

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
PERIODE TRIWULAN II
1 APRIL 2026 s/d 30 JUNI 2026

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas
2023



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I A KHUSUS

Jalan Kapten A Rivai No 16 Palembang

Telp. (0711) 363310-313555

Email : www.pnpalembang@gmail.com

Website : www.pn-palembang.go.id

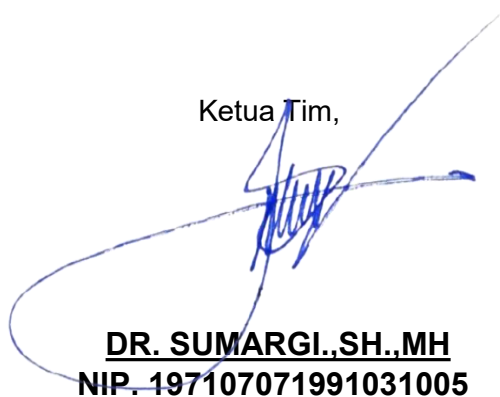
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Triwulan II Periode Tanggal 1 APRIL 2026 s.d. 30 JUNI 2026

Disahkan di Palembang
Pada hari Rabu, 01 Juli 2026



Ketua Tim,



DR. SUMARGI.,SH.,MH
NIP. 197107071991031005

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,



Dr. INYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002

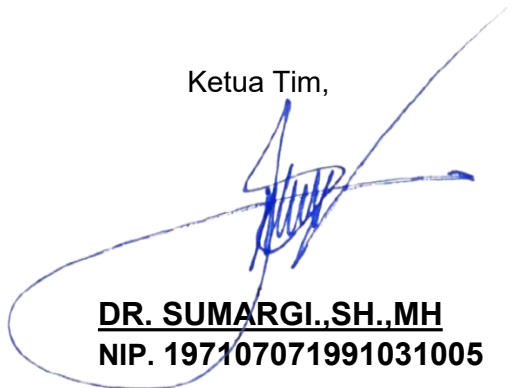
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Palembang.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Palembang, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Ketua Tim,



DR. SUMARGI.,SH.,MH
NIP. 197107071991031005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I1

KUISIONER SURVEI 1

A. Daftar Pertanyaan / Kuesioner 1

B. Bentuk Jawaban1

BAB II2

METODOLOGISURVEI2

A. Kriteria Responden 2

B. Metode Pencacahan 2

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis 2

BAB III4

PENGOLAHAN SURVEI4

A. Analisis Hasil Survei.....4

B. Tindak Lanjut Hasil Survei 13

BAB IV 15

DATA SURVEI 15

A. Data Responden 15

B. Data Dukung Lainnya 30

**LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**PERIODE TRIWULAN I
1 APRIL 2026 s/d 30 JUNI 2026**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I A KHUSUS

Jalan Kapten A Rivai No 16 Palembang

Telp. (0711) 363310-313555

Email : www.pnpalembang@gmail.com

Website : www.pn-palembang.go.id

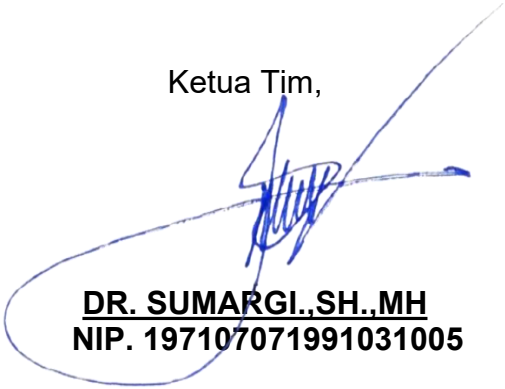
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 s.d. 30 Juni 2026

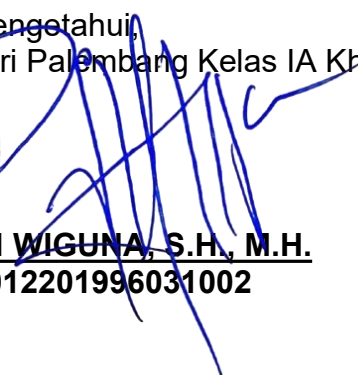
Disahkan di Palembang
Pada hari Rabu , 01 Juli 2026



Ketua Tim,


DR. SUMARGI.,SH.,MH
NIP. 197107071991031005

Mengotahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,



Dr. I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002

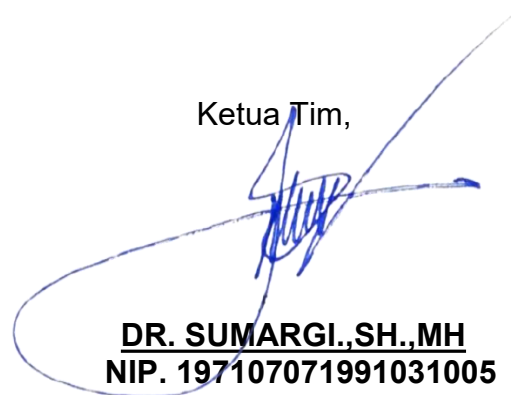
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Palembang.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Palembang, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Ketua Tim,



DR. SUMARGI.,SH.,MH
NIP. 197107071991031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 1

 C. Prinsip 2

 D. Ruang Lingkup 2

 E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi 3

 F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi 3

 G. Manfaat 3

 H. Sumber Hukum 4

BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

 A. Pelaksana Survei 5

 B. Periode Survei 5

 C. Tahapan Survei 6

 D. Teknik Survei 6

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

 A. Persiapan Survei 7

 B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 8

BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI

 A. Penyiapan Aplikasi 10

 B. Pengisian Survei 10

BAB V ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

 A. Profil Responden 11

 B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi 13

 C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang .. 17

 D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi 18

BAB V PENUTUP

 A. Kesimpulan 20

 B. Rekomendasi 20

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Palembang dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan public yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan penilaian atas Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang;

2. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu :

1. Transparan

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan survei persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan survei persepsi anti korupsi dan survei harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transparansi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Pembayaran
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 -3,25	62,51 -81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas Survei Persepsi Anti Korupsi;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

6. Penilaian atas bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

JADWAL TAHUNAN PELAKSANAAN SURVEI															
No	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I														
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I														
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II														
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II														
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III														
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III														
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV														
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV														

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat :

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098942>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Tim Survei (Indeks Kepuasan Masyarakat, Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi, Survei Zona Integritas dan Survei Harian) Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan diluar persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai	Jarang Sesuai	Sering Sesuai	Selalu Sesuai
Prosedur	Prosedur	Prosedur	Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani
Selalu Meminta	Sering Meminta	Jarang Meminta	Tanpa Meminta
Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Palembang. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari *Krejcie and Morgan* (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ A^2 . N . P . Q \} / \{ d^2 (N-1) + A^2 . P . Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

A² = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data di Kantor Pengadilan Negeri Palembang, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2026 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisioner

Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Palembang.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Palembang selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan :

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet;
2. Membuka browser/peramban halaman *website*,
3. Membuka alamat website:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098942>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Data Responden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badilum;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan.

BAB V
ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Jenis Kelamin			
No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	88	57,14
2	Perempuan	66	42,86
JUMLAH		154	100

2. Tingkat Pendidikan responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada pengadilan negeri palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Responden			
No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	15	9,74%
5	D1	109	70,79%
6	D2	7	4,54%
7	D3	0	0
8	S1	23	14,93%
9	S2	0	0
10	S3	0	0
JUMLAH		154	100

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026

sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu :

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	8	5,19%
2	TNI	3	1,95%
3	POLRI	4	2,60%
4	Swasta	54	35,06%
5	Wirausaha	69	44,81%
6	Tenaga Kontrak	15	9,74%
7	Lainnya/ Advokat	1	0,65%
JUMLAH		154	100

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Domisili Responden

NO	DOMISILI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	SUMATERA SELATAN	147	95,45%
2	BENGKULU	2	1,30%
3.	JAMBI	5	3,25%
Jumlah		154	100

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh oleh masyarakat/responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Layanan Pidana	5	3,25%
2	Layanan Perdata	2	1,30%
3	Layanan Hukum / Informasi	145	94,16%
4	Layanan Administrasi Umum	0	0
5	Layanan Niaga	0	0
6	Layanan PHI	2	1,30%
7	Layanan e-Court	0	0
Jumlah		154	100

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen

Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 yaitu :

Data Umur Responden			
NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	18 - 28 Tahun	92 Orang	59,74 %
2	29 - 39 Tahun	44 Orang	28,57 %
3	40 - 49 Tahun	13 Orang	8,44 %
4	50 - 59 Tahun	5 Orang	3,25 %
5	60 - 69 Tahun	0 Orang	0,00 %
JUMLAH		154	100

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai Unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 149 (96,75%) dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu Sesuai Prosedur (A)” pada nilai rata-rata sebesar “3.968” dimana berada pada nilai interval 3,26-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “Bersih dari Korupsi”.

Unsur Manipulasi Peraturan (U1)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai Prosedur	0	0
2	C	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3	B	Sering Sesuai Prosedur	5	3,25%
4	A	Selalu Sesuai Prosedur	149	96,75%
JUMLAH			154	100

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 148 (96,10%) dari jumlah responden memilih jawaban “Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)” pada nilai rata-rata sebesar “3,961” dimana berada pada nilai interval 3,26-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “Bersih dari Korupsi”.

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	0	0

2	C	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	0	0
3	B	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	6	3,90%
4	A	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	148	96,10%
JUMLAH			154	100

3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Menjual Pengaruh ini menunjukan hasil analisis perolehan 153 (99,36%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,994”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Menjual Pengaruh (U3)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	1	0,64%
4	A	Tidak Ada	153	99,36%
JUMLAH			154	100

4. Unsur Transparansi Biaya (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukan hasil analisis perolehan 149 (96,75%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada indeks rata-rata skor sebesar **“3,968”** dimana berada pada interval skor **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Transparansi Biaya(4)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	0	0
2	C	Jarang	0	0
3	B	Sering	5	3,25%
4	A	Selalu	149	96,75%
JUMLAH			154	100

5. Unsur Biaya Tambahan (U5)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Biaya Tambahan ini menunjukan hasil analisis perolehan 146 (94,80%) dari jumlah responden memilih

jawaban **“Tidak ada” (A)**” pada nilai rata-rata sebesar **“3,935”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Biaya Tambahan (U5)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	1	0,66%
2	C	Jarang	0	0
3	B	Sering	7	4,54%
4	A	Selalu	146	94,80%
JUMLAH			154	100

6. Unsur Hadiah (U6)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 152 (98,70%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,987”** dimana berada pada nilai interval **3,26-3,861** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi.”**

Unsur Hadiah (U6)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	2	1,30
4	A	Tidak Ada	152	98,70
JUMLAH			154	100

7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 150 (97,40%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,974”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	0	0
2	C	Jarang	0	0

3	B	Sering	4	2,60
4	A	Selalu	150	97,40
JUMLAH			154	100

8. Unsur Percaloan (U8)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Percaloan menunjukkan hasil analisis perolehan 154 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,00”** dimana berada pada

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	154	100
JUMLAH			154	100

nterval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Percaloan (U8)

9. Unsur Perbuatan Curang (U9)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 152 (98,70%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,987”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Perbuatan Curang (U9)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	2	1,30%
4	A	Tidak Ada	152	98,70%
JUMLAH			260	100

10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 154 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,00”** dimana

berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Transaksi Rahasia (U10)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	154	100
JUMLAH			154	100

C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang melalui aplikasi SISUPER, sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
U1	Manipulasi Peraturan	611	3.968	0.397
U2	Penyalahgunaan Jabatan	610	3.961	0.396
U3	Menjual Pengaruh	615	3.994	0.399
U4	Transparansi Biaya	611	3.968	0.397
U5	Biaya Tambahan	606	3.935	0.394
U6	Hadiah	614	3.987	0.399
U7	Transparansi Pembayaran	612	3.974	0.397
U8	Percaloan	616	4.000	0.400
U9	Perbuatan Curang	614	3.987	0.399
U10	Transaksi Rahasia	616	4.000	0.400
Jumlah			39,773	3,977
Nilai SPAK			3,98	100

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “**3,98 / 100%**” tersebut jika dikonversikan seperti dalam table bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang “**Bersih dari Korupsi**” jika mengacu kepada Nilai interval Indeks Persepsi Korupsi antara “**3,26- 4,00**” dengan Konversi Indeks Persepsi Korupsi angka “**81,26-100.00**”

D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kepada responden ke depannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai baik harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

**3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	616	4,00	U8
2	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	616	4,00	U10
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	615	3,994	U3

**3 (tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	606	3,935	U5
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	610	3,961	U2
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	611	3,968	U1

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,98 / 99,43%** masuk pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan akumulasi dari indeks 10 unsur, yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks 3.968
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 3.961
3. Unsur Menjual Pengaruh mendapat indeks 3,994
4. Unsur Tranparansi Biaya mendapat indeks 3,968
5. Unsur Biaya Tambahan mendapat indeks 3,935
6. Unsur Hadiah mendapat indeks 3,987
7. Unsur Transparansi Pembayaran mendapat indeks 3,974
8. Unsur Percaloan mendapat indeks 4,000
9. Unsur Perbuatan Curang mendapat indeks 3,987
10. Unsur Transaksi Rahasia mendapat indeks 4,000

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang periode Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **biaya tambahan, penyalahgunaan jabatan dan manipulasi aturan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap Aparatur Pengadilan Negeri Palembang harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Palembang.

TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Survey Pelayanan Elektronik

- Survey Layanan PTSP
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- Survey Persepsi Anti Korupsi
- Zona Integritas SPKP & SPAK



SATUAN KERJA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



ZONA INTEGRITAS



SPAK



SKM



PTSP

← Logout ke Dashboard Nasional



FORM DATA RESPONDEN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.



1. Data Responden

NAMA LENGKAP *

Tulis nama atau inisial...

PENDIDIKAN *

Pilih Opsi...

UMUR (MIN. 18TH) *

Ketik umur...

JENIS KELAMIN *

Pilih Opsi...

NOMOR WHATSAPP *

Contoh: 081234567890

DOMISILI *

Pilih Opsi...

PEKERJAAN *

Pilih Opsi...

LANJUTKAN →



FORM KUESIONER

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.



3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 3 dari 10

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
--------	--------	--------	-----------

↳ Pertanyaan Sebelumnya

← KEMBALI



siSUPER

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

[← KEMBALI](#)

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 6 dari 10

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

[↶ Pertanyaan Sebelumnya](#)

[← KEMBALI](#)



siSUPER

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

[← KEMBALI](#)

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 10 dari 10

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Selalu

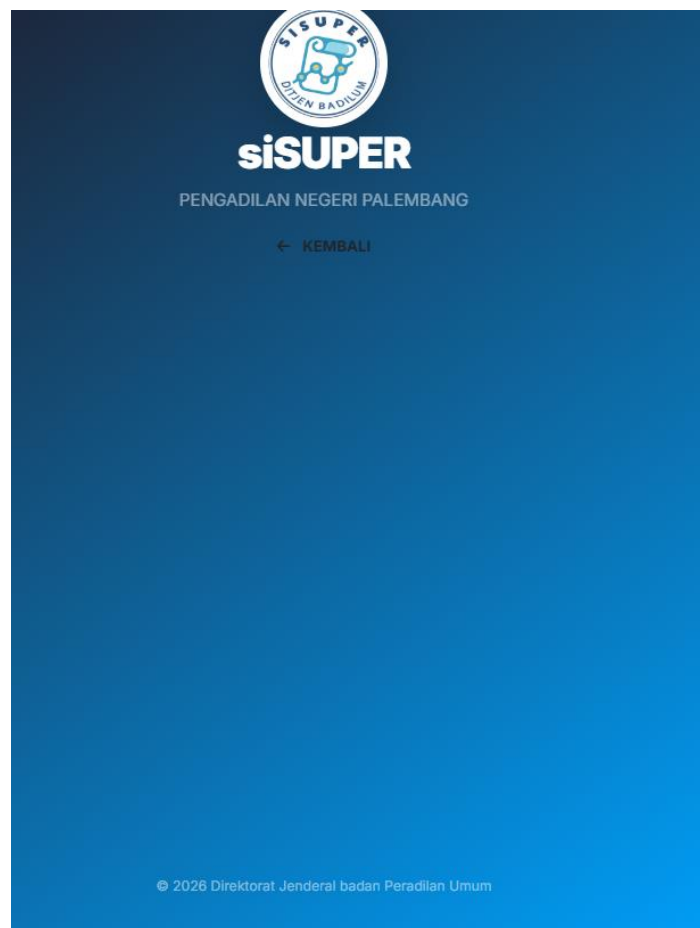
Sering

Jarang

Tidak Ada

[↶ Pertanyaan Sebelumnya](#)

[← KEMBALI](#)

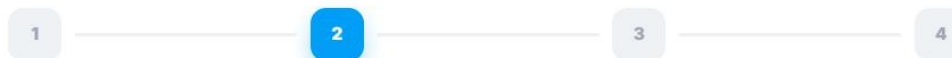


FORM LAYANAN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.



2. Informasi Layanan

JENIS LAYANAN YANG DITERIMA *

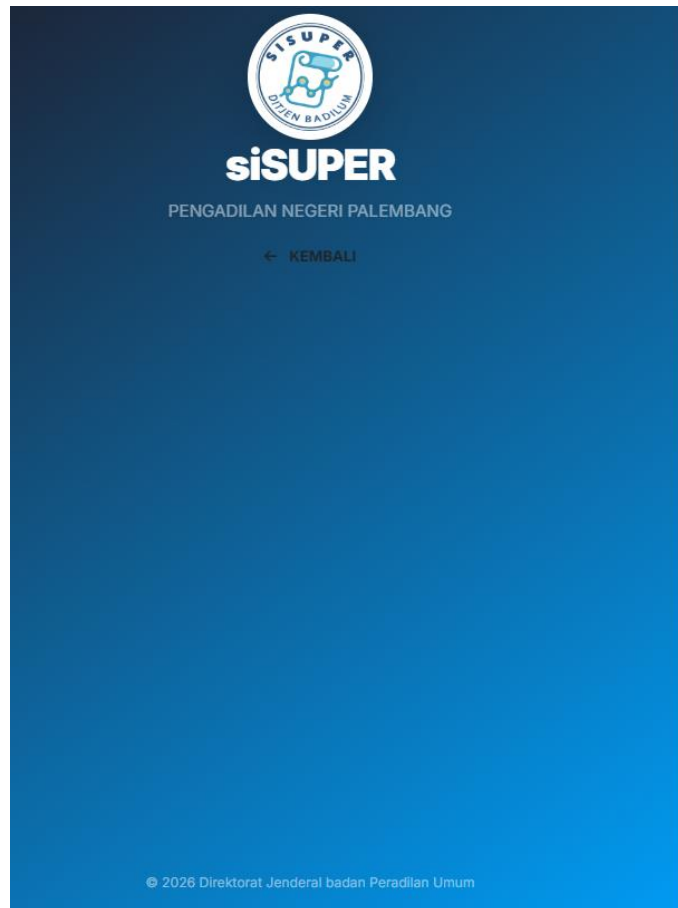
Pilih Opsi...

PERNAH MENERIMA LAYANAN SEBELUMNYA? *

Pilih Opsi...

← KEMBALI

LANJUTKAN →



FORM KESAN & PESAN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4



Hampir Selesai!

Mohon berikan kesan & pesan singkat untuk kami.

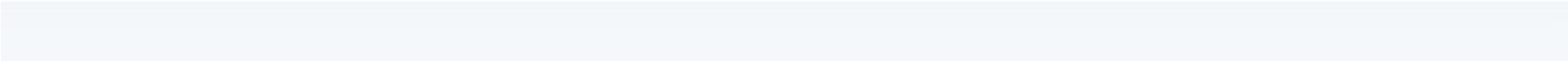
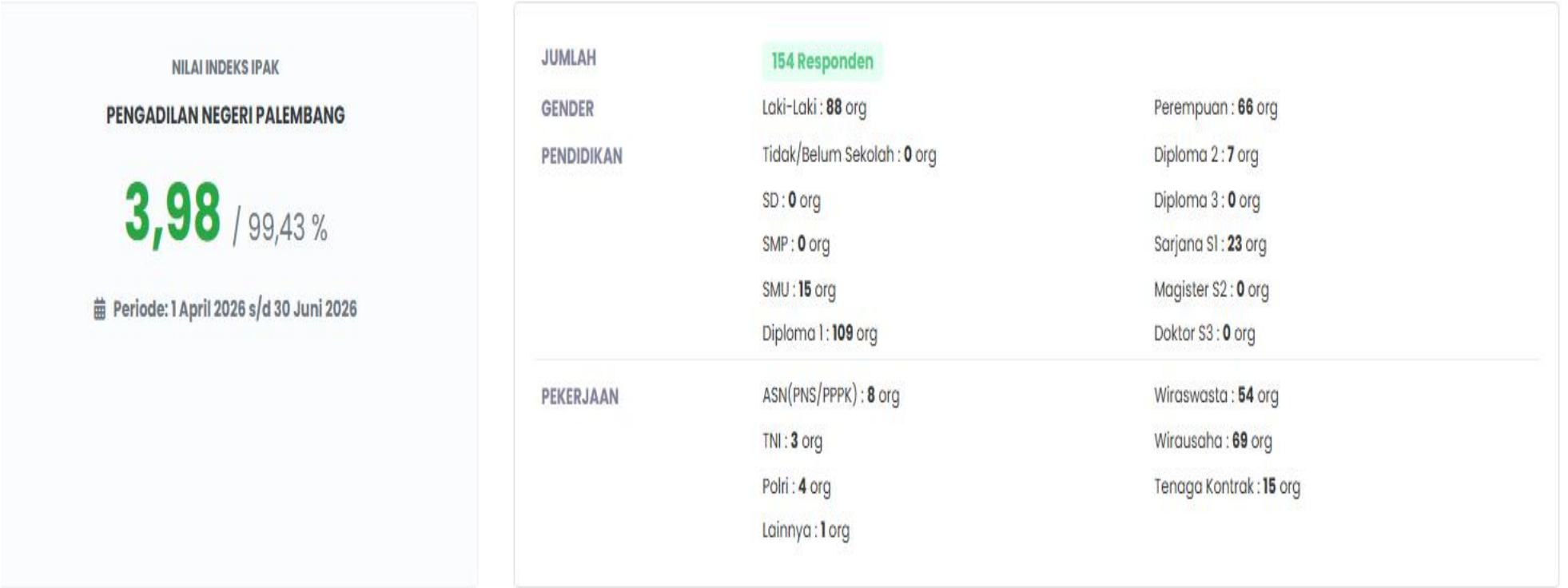
KESAN & PESAN *

Tuliskan di sini...

SIMPAN DATA ✓

← KEMBALI

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN II DARI APLIKASI SISUPER

HASIL ANALISIS DATA IPAK

Berdasarkan kriteria standar nasional siSUPER

 Preview Publikasi

Ringkasan Nilai Data Umum Responden Domisili **Umur** Layanan Nilai Unsur Tindak Lanjut

Excel PDF

Cari:

KATEGORI UMUR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
18 - 28 Tahun	92 Orang	59,74 %
29 - 39 Tahun	44 Orang	28,57 %
40 - 49 Tahun	13 Orang	8,44 %
50 - 59 Tahun	5 Orang	3,25 %
60 - 69 Tahun	0 Orang	0,00 %

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN II DARI APLIKASI SISUPER

HASIL ANALISIS DATA IPAK

Berdasarkan kriteria standar nasional sisUPER

 Preview Publikasi

Ringkasan Nilai Data Umum Responden Domisili Umur Layanan **Nilai Unsur** Tindak Lanjut

Excel PDF

Cari:

NILAI INDEKS	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	TOTAL
Jumlah Nilai per Unsur	611	610	615	611	606	614	612	616	614	616	
NRR per Unsur	3.968	3.961	3.994	3.968	3.935	3.987	3.974	4.000	3.987	4.000	39.773
NRR Tertimbang	0.397	0.396	0.399	0.397	0.394	0.399	0.397	0.400	0.399	0.400	3.977

TIGA UNSUR TERENDAH

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

3.94

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

3.96

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

3.97

TIGA UNSUR TERTINGGI

↑ 3 UNSUR TERTINGGI

Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

4.00

Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

4.00

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

3.99

**PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE 1 APRIL 2026 - 30 JUNI 2026**

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Palembang

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	TIARAID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
2	FAIRUZID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
3	ANGGAID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
4	RANGGAID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
5	UMMUID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
6	WAHYUID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
7	FARAHID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
8	PUSPITAID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
9	BRIANID	LAKI-LAKI	41 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
10	BRIANID	LAKI-LAKI	41 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
11	KINOID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2026
12	JUANID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
13	IWANID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
14	ILHAMID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
15	WANDAID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
16	SEPTIANID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
17	PUJAID	PEREMPUAN	41 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
18	RIOID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
19	ZAKIID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
20	SEPTIOID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
21	ZAINALID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
22	SAIPULID	LAKI-LAKI	41 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
23	DITOID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juni 2026
24	DEWAID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2026
25	TIAID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2026
26	TIOID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2026
27	MUMTAZID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2026
28	JODIID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2026
29	ALBERTID	LAKI-LAKI	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Juni 2026
30	GIBRANID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
31	TIRTOID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
32	PUTRIID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
33	CLARAID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
34	JORDIID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
35	DODIID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
36	HERUID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
37	RIRNID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026

38	MARIAID	PEREMPUAN	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
39	ANTONID	LAKI-LAKI	35 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
40	Jiwa RagasyasID	LAKI-LAKI	56 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
41	DikaID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Juni 2026
42	SolihinID	LAKI-LAKI	45 TAHUN	PHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Juni 2026
43	AuliaID	PEREMPUAN	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Juni 2026
44	PutraID	LAKI-LAKI	21 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Juni 2026
45	WawanID	LAKI-LAKI	21 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
46	WawanID	LAKI-LAKI	21 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	11 Juni 2026
47	VinalID	PEREMPUAN	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
48	UdinID	LAKI-LAKI	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
49	Tati ID	PEREMPUAN	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
50	SintaID	PEREMPUAN	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
51	RisaID	LAKI-LAKI	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
52	RisaID	PEREMPUAN	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
53	NikoID	LAKI-LAKI	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
54	NikoID	LAKI-LAKI	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2026
55	AldiID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	11 Juni 2026
56	DharmaID	LAKI-LAKI	25 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2026
57	CintyaID	PEREMPUAN	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2026
58	BambangID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2026
59	BambangID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2026
60	AisyahID	PEREMPUAN	21 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2026
61	BaladewaID	LAKI-LAKI	45 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
62	BaladewaID	LAKI-LAKI	45 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
63	Prima AlamsyahID	LAKI-LAKI	33 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
64	Jiwa RagasyaID	LAKI-LAKI	28 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
65	NatarziaID	PEREMPUAN	27 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
66	NatarziaID	PEREMPUAN	27 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
67	ElizaID	PEREMPUAN	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
68	DimasID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
69	DimasID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
70	CintaID	PEREMPUAN	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
71	BayuID	LAKI-LAKI	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
72	AgungID	LAKI-LAKI	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Juni 2026
73	JokoID	LAKI-LAKI	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juni 2026
74	IndahID	PEREMPUAN	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juni 2026
75	IndahID	PEREMPUAN	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juni 2026
76	HadiiID	LAKI-LAKI	24 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juni 2026
77	GunawanID	LAKI-LAKI	23 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juni 2026
78	FitriID	PEREMPUAN	22 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	8 Juni 2026
79	EkoiD	LAKI-LAKI	25 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juni 2026

[illegible]

122	Endang Bunyamin	PEREMPUAN	56 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2026
123	Endang Bunyamin	LAKI-LAKI	53 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2026
124	VANIA IRAWATYID	LAKI-LAKI	46 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2026
125	RIAH HANAFIAH.SURIAH HANAFIAH	PEREMPUAN	45 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2026
126	SURIAH HANAFIAHID	PEREMPUAN	45 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2026
127	Rusman ID	LAKI-LAKI	57 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2026
128	AnduID	LAKI-LAKI	40 TAHUN	HUKUM	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	22 April 2026
129	FajarID	LAKI-LAKI	28 TAHUN	HUKUM	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	22 April 2026
130	Oey Mei LianID	LAKI-LAKI	50 TAHUN	HUKUM	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	21 April 2026
131	Windi TriyaniID	PEREMPUAN	40 TAHUN	HUKUM	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	21 April 2026
132	AwaludinID	LAKI-LAKI	45 TAHUN	HUKUM	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	14 April 2026
133	BilqisID	PEREMPUAN	28 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 April 2026
134	Nyanyu Ningsi ID	PEREMPUAN	29 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 April 2026
135	Himan Hidayat ID	LAKI-LAKI	30 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2026
136	Mayang Sari ID	PEREMPUAN	25 TAHUN	PERDATA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2026
137	BayID	LAKI-LAKI	31 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2026
138	WulandariID	PEREMPUAN	26 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2026
139	Nadia PujatutiID	PEREMPUAN	29 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2026
140	Alya Nasifti ID	PEREMPUAN	28 TAHUN	PIDANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2026
141	Kartika Asmara ID	PEREMPUAN	27 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 April 2026
142	MelaniID	PEREMPUAN	28 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 April 2026
143	M. Ariefdan ID	LAKI-LAKI	29 TAHUN	PIDANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 April 2026
144	FadhilaID	PEREMPUAN	28 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 April 2026
145	MonicaID	PEREMPUAN	25 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 April 2026
146	DevalID	LAKI-LAKI	33 TAHUN	PIDANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 April 2026
147	BalqisID	PEREMPUAN	27 TAHUN	PERDATA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 April 2026
148	BambangID	LAKI-LAKI	30 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 April 2026
149	HestiID	PEREMPUAN	26 TAHUN	PIDANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 April 2026
150	SetnoID	LAKI-LAKI	27 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 April 2026
151	HestianaID	PEREMPUAN	27 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 April 2026
152	WulanID	PEREMPUAN	30 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 April 2026
153	RetnoID	LAKI-LAKI	27 TAHUN	PIDANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 April 2026
154	Gita SarinID	PEREMPUAN	25 TAHUN	HUKUM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 April 2026
					Jumlah	611	610	615	611	606	614	612	616	614	616
					NRR Per RL	3,968	3,961	3,994	3,968	3,935	3,987	3,974	4	3,987	4
					NRR Tertimbang	0,397	0,396	0,399	0,397	0,394	0,399	0,397	0,4	0,399	0,4
					IPK Unit Pelayanan										

